

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini, banyak perusahaan mengalami keluasan dalam menjalankan kehidupan organisasinya. Begitu pula dengan kegiatan di dalam koperasi. Tidak semua koperasi mampu menjalankan aktivitas dan usahanya dengan baik. Hal ini merupakan akibat dari kurangnya partisipasi anggota dan pengurus koperasi yang belum mampu mewujudkan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan kehidupan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, sangat mungkin keberadannya tinggal menjadi slogan semata. Riyanto & Suseno (2024).

Peran koperasi dapat di pandang sebagai sarana yang efektif bagi para anggotanya untuk menjalin kerja sama dalam mengoptimalkan potensi serta memanfaatkan peluang usaha yang tersedia. Dalam hal ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah kerja sama, tetapi juga sebagai strategi untuk membuka akses ke pasar,, modal, informasi, dan teknologi. Pengembangan koperasi memungkinkan anggotanya untuk bekerja sama secara efisien, kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada level internal kopersi, tetapi juga mencakup kerja sama eksternal dengan pihak lain seperti pasar, pemodal, dan sumber informasi serta teknologi. Melalui koperasi, anggota dapat saling memndukung dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai keberhasilan bersama. Selviana Nasution *et al* (2024: 522-530)

Pentingnya koperasi sebagai sarana pengembangan terlihat dalam fungsinya membuka akses terhadap pasar. Melalui koperasi, para anggota dapat bersama-sama mengakses peluang pasar yang mungkin sulit dicapai secara individu. Selain itu, koperasi juga berfungsi sebagai sumber permodalan bagi anggotanya dengan memberikan dukungan finansial yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha masing-masing. Menariknya, koperasi bukan hanya tentang kerja sama ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Sri Zulharti dalam Nur Aulia Alfitrah *et al* (2023).

Meskipun kegiatan ekonomi koperasi sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, perkembangannya masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan koperasi, termasuk memberikan kemudahan aspek administratif, koperasi tetap menghadapi berbagai tantangan sehingga belum berkembang sesuai dengan harapan. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk menciptakan hubungan kerja sama dan kebersamaan, yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip koperasi, seperti gotong royong dan asas kekeluargaan, seharusnya berjalan seiring dengan nilai budaya bangsa. Namun, di era digital saat ini, koperasi dituntut untuk mampu beradaptasi dan bertransformasi agar tetap eksis dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Menurut undang-undang Republik Indonesia tentang perkoperasian nomor 17/2012 pasal 1: “koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan

budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” Selviana Nasution et al (2024: 522-530).

Tabel 1.1
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit) 2021

No	Provinsi	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit) 2021
1.	Aceh	4.102
2.	Sumatera Utara	5.033
3.	Sumatera Barat	2.200
4.	Riau	3.248
5.	Jambi	2.046
6.	Sumatera Selatan	3.992
7.	Bengkulu	1.983
8.	Lampung	2.282
9.	Kep. Bangka Belitung	711
10.	Kep. Riau	982
11.	DKI. Jakarta	4.542
12.	Jawa Barat	15.621
13.	Jawa Tengah	10.270
14.	DI Yogyakarta	1.853
15.	Jawa Timur	22.845
16.	Banten	4.216
17.	Bali	4.193
18.	Nusa Tenggara Barat	2.622
19.	Nusa Tenggara Timur	2.874
20.	Kalimantan Barat	3.142
21.	Kalimantan Tengah	2.921
22.	Kalimantan Selatan	1.875
23.	Kalimantan Timur	3.067
24.	Kalimantan Utara	612
25.	Sulawesi Utara	3.668
26.	Sulawesi Tengah	1.435
27.	Sulawesi Selatan	4.535
28.	Sulawesi Tenggara	2.413
29.	Gorontalo	975

No	Provinsi	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit) 2021
30.	Sulawesi Barat	862
31.	Maluku	2.488
32.	Maluku Utara	1.081
33.	Papua Barat	723
34.	Papua Barat Daya	-
35.	Papua	2.434
36.	Papua Selatan	-
37.	Papua Tengah	-
38.	Papua Pegunungan	-
Jumlah		127.846

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM dikutip dari Publikasi Statiskan Indonesia.

Berdasarkan pada Tabel 1.1 data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 127.846 unit dengan sebaran di seluruh provinsi. Jawa Timur mencatat jumlah terbanyak yaitu 22.845 unit, sedangkan wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Maluku Utara, memiliki jumlah yang relatif sedikit. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi koperasi, di mana provinsi dengan basis ekonomi besar cenderung memiliki koperasi lebih banyak.

Posisi koperasi di Indonesia pada dasarnya justru di dominasi oleh koperasi kredit yang menguasai sekitar 55-60 persen dari total aset koperasi. Sementara itu, dari sisi jumlah koperasi yang terhubung dengan program pemerintah hanya mencakup kurang lebih 25% dari keseluruhan populasi koperasi atau sekitar 35% dari koperasi yang masih aktif. Koperasi pada saat ini telah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang bersifat otonom, namun demikian, arah bisnis koperasi perlu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan universal dengan tingkat urgensi tinggi, seperti layanan keuangan, penyediaan infrastruktur, serta pembelian bersama.

Dengan adanya otonomi, koperasi memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi lokal, meskipun pada saat yang sama juga berpotensi menimbulkan konflik yang perlu diselesaikan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penguatan potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi, serta pembentukan pusat inovasi dan teknologi menjadi syarat utama bagi ketahanan koperasi. Sitepu & Hasyim dalam Nabila & Arjuna (2021: 528-535).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.508 pulau serta garis Pantai sepanjang 81.000 km, Dimana sekitar 70% wilayah teritorialnya terdiri atas lautan, dengan total luas perairan mencapai 5,8 juta km², Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati maupun non hayati yang sangat melimpah. Kondisi tersebut menjadikan sebagian besar penduduk yang bermukim di Kawasan pesisir dan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan sebagai nelayan. Koperasi perikanan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, pembangunan perekonomian terpacu lebih cepat karena adanya lembaga yang mampu memberdayakan perekonomian masyarakat. Merissa Fermica Iskandar *et al* (2023: 99).

Koperasi perikanan merupakan koperasi yang beranggotakan para pengusaha pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang kepentingan dan mata pencahariannya berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perikanan. Koperasi ini menjalankan berbagai usaha yang berhubungan secara langsung dengan sektor

perikanan, mulai dari kegiatan produksi, pengolahan, hingga pembelian maupun penjualan bersama hasil-hasil usaha perikanan yang dihasilkan. Maulana dalam Falah *et al* (2023:102).

Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menyatakan bahwa definisi nelayan adalah orang yang melakukan usaha perikanan dimana usaha perikanan tersebut dapat mencakup kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran hasil perikanan. Berdasarkan data dari Direktorat jendral perikanan tangkap Kementerian kelautan dan perikanan hingga tahun 2021, tercatat sebanyak 2.359.264 orang nelayan dengan jumlah armada sekitar 570.000 unit. Dari total tersebut, sekitar 90% merupakan perahu nelayan kecil dengan kapasitas di bawah 30 *Gross Tonnage* (GT). Sebagian besar nelayan tersebut adalah nelayan tradisional, nelayan kecil, maupun nelayan penyewa yang melakukan kegiatan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, berbeda dengan perusahaan perikanan yang berorientasi pada kegiatan bisnis atau komersial dengan menggunakan kapal berkapasitas lebih dari 30 *Gross Tonnage* (GT). Nabiela Rizki Alifa & Rahmadian (2024: 362).

Tabel 1.2
Koperasi Perikanan Di Jawa Barat

No	Nama Koperasi	Kabupaten/Kota
1.	Koperasi Samudra Jabar	Bekasi
2.	Koperasi Bahari Pintar	Bekasi
3.	Koperasi Laut Mandiri	Karawang
4.	Koperasi Bahari Sejahtera	Subang
5.	Koperasi Nelayan Mitra	Sukabumi
6.	Koperasi Pantai Makmur	Subang
7.	Koperasi Bahtera Nusantara	Sukabumi
8.	Koperasi Mina Sumitra	Indramayu

No	Nama Koperasi	Kabupaten/Kota
9.	Koperasi Nelayan Bersatu	Indramayu
10.	Koperasi Nelayan Pantai Indah	Cirebon
11.	Koperasi Mina Jaya	Cirebon
12.	Koperasi Nelayan Garut Selatan	Garut
13.	Koperasi Pesisir Lestari	Garut
14.	Koperasi Mina Asri	Tasikmalaya
15.	Koperasi Laut Selatan	Tasikmalaya
16.	Koperasi Pesisir Sejahtera	Pangandaran
17.	Koperasi Samudra Indah	Pangandaran
18.	Koperasi Nelayan Sejahtera II	Indramayu
19.	Koperasi Bahari Maju	Cirebon
20.	Koperasi Laut Rakyat	Bekasi

Sumber: Kementerian Perikanan dan Kelautan

Berdasarkan Tabel 1.2 daftar koperasi perikanan di Jawa Barat, terlihat bahwa koperasi Mina Sumitra Indramayu merupakan salah satu koperasi yang menonjol diantara koperasi lainnya karena berada di wilayah dengan jumlah koperasi perikanan terbanyak bersama kabupaten Cirebon. Kondisi ini mencerminkan bahwa Indramayu memiliki potensi besar dalam sektor perikanan tangkap sehingga peran koperasi menjadi sangat strategis dalam mengelola sumber daya tersebut.

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang umumnya berada pada lapisan ekonomi menengah ke bawah dan kerap menjadi pihak pertama yang paling terdampak akibat ketidakberdayaan serta kerentanannya. Setiap kali melaut, nelayan harus menghadapi ketidakpastian pendapatan, ditambah dengan tekanan musim surut hasil tangkapan yang berlangsung cukup lama. Selain itu, nelayan juga diharapkan pada berbagai persoalan dan bentuk eksploitasi yang muncul seiring dengan perkembangan modernisasi yang mulai diterapkan dalam sektor perikanan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan yang benar-benar menyentuh langsung kehidupan masyarakat nelayan maupun pesisir. Koperasi dapat menjadi wadah yang mampu menyesuaikan perannya dengan kebutuhan masyarakat nelayan dan pesisir. Nelayan yang tergabung sebagai anggota koperasi perikanan di setiap daerah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya perikanan, dengan tetap mengedepankan solidaritas, adat, serta budaya yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Arifandy *et al* (2020: 119).

Tingkat kesejahteraan nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan yang diperoleh. Jumlah tangkapan berpengaruh langsung terhadap besarnya pendapatan yang diterima, sehingga nelayan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, kebutuhan pokok masyarakat menjadi lebih terpenuhi, dan pada akhirnya jumlah penduduk miskin dapat berkurang. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga perlu mendorong munculnya aspirasi serta tuntutan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. pembangunan tidak hanya dapat diukur dari aspek pertumbuhan semata. Salah satu konsekuensi dari pembangunan yang hanya menekankan paradigma pertumbuhan adalah timbulnya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta meningkatnya angka pengangguran yang merajalela, pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional. Muhammad Alwi (2022: 4).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa isu kesejahteraan nelayan dan efektivitas koperasi perikanan bukan hanya merupakan persoalan lokal, tetapi juga bagian dari agenda global dalam kerangka pembangunan

berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-1 (menghapus kemiskinan), tujuan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), serta tujuan ke-14 (ekosistem laut). Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada strategi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota memiliki relevansi yang luas, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan global. Sari & Rahmayanti (2022).

Kabupaten Indramayu yang terletak di pesisir utara Jawa Barat dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi perikanan laut terbesar di Indonesia. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa memberikan keunggulan strategis dalam kegiatan penangkapan ikan. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, ribuan nelayan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini, dengan ratusan kapal motor dan perahu tradisional yang beroperasi setiap hari. Hasil tangkapan ikan tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, tetapi juga dipasarkan ke berbagai daerah di Jawa Barat bahkan hingga ke luar wilayah provinsi Firmansyah *et al* (2024).

Potensi tersebut menjadikan Indramayu dijuluki sebagai “lumbung ikan” Jawa Barat. Produksi ikan laut di wilayah ini terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan komoditas yang beragam, mulai dari ikan pelagis kecil, ikan demersal, hingga hasil tangkapan bernilai tinggi seperti udang dan cumi-cumi. Kegiatan perikanan ini juga mendorong tumbuhnya berbagai sektor turunan, antara lain pengolahan hasil laut, perdagangan ikan, serta jasa transportasi dan distribusi.

Dengan demikian, sektor perikanan tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi penopang utama perekonomian masyarakat pesisir Indramayu. Di balik potensi yang besar tersebut, nelayan Indramayu masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Tingkat kesejahteraan sebagian besar nelayan masih tergolong rendah, yang tercermin dari pendapatan harian yang fluktuatif, keterbatasan akses terhadap permodalan, serta tingginya biaya operasional melaut. Ketergantungan terhadap hasil tangkapan menyebabkan nelayan sangat rentan terhadap perubahan musim, kondisi cuaca, dan fluktuasi harga ikan. Situasi ini berdampak pada keberlanjutan ekonomi rumah tangga nelayan serta memengaruhi kualitas hidup mereka, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Mustaruddin *et al* (2023: 91:100).

Tabel 1.3
Jumlah Koperasi Perikanan Laut Di Indramayu

No.	Nama Koperasi	Desa / Kecamatan
1.	Kud Mina Jaya Tegal Agung	Desa Benda, Kecamatan Karangampel
2.	Kud Ngupaya Mina	Desa Dadap, Kecamatan Junti
3.	Kud Sri Mina Sari	Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat
4.	Kud Mina Mulia	Desa Lombang, Kecamatan Junti
5.	Kud Mina Sejati	Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat
6.	Kud Baita Mina Lestari	Desa Majakerta, Kecamatan Balongan
7.	Kpl Mina Sumitra	Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu
8.	Kud Mina Makmur Lestari	Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu
9.	Kud Misayamina	Desa Eretan Kulon, kecamatan Kandanghaur
10.	Kud Mina Bahari	Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu

Berdasarkan Tabel 1.3 koperasi perikanan di kabupaten Indramayu tersebar di sejumlah desa pesisir, seperti Karangsong, Juntinyuat, hingga Eretan, yang mencerminkan peran strategis koperasi dalam menunjang perekonomian masyarakat nelayan. Keberadaan koperasi perikanan laut (KPL) Mina Sumita di desa Karangsong sebagai salah satu koperasi utama menunjukkan bahwa penerapan strategi kompensasi serta dukungan organisasi yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga koperasi tidak hanya berperan sebagai wadah usaha, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas hidup nelayan di Indramayu.

Di samping itu, nelayan juga menghadapi permasalahan struktural dalam sistem distribusi hasil tangkapan. Mekanisme pelelangan di sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum berjalan optimal sehingga posisi tawar nelayan sering kali lemah di hadapan pedagang besar. Akibatnya, harga jual ikan yang diterima nelayan relatif rendah dibandingkan dengan nilai pasar yang sesungguhnya. Kondisi ini mendorong sebagian nelayan terjebak dalam lingkaran utang kepada tengkulak atau pemilik modal, yang pada akhirnya memperburuk kondisi sosial-ekonomi mereka. Susilowati & Purwandhini (2022: 134-149).

Untuk menghadapi persoalan tersebut, koperasi perikanan hadir sebagai salah satu solusi alternatif. Koperasi perikanan di Indramayu dibentuk dengan tujuan memperkuat posisi tawar nelayan, menyediakan akses permodalan, serta mengatur distribusi hasil tangkapan agar lebih adil dan menguntungkan bagi anggota. Melalui wadah koperasi, nelayan diharapkan memiliki kekuatan kolektif dalam menghadapi tantangan struktural yang ada. Akan tetapi, efektivitas koperasi

sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola serta manajemen internal yang dijalankan. Wulandari & Halimatussadiyah (2022).

Salah satu koperasi yang cukup menonjol di Indramayu adalah Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra. Koperasi ini didirikan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kerja sama dalam pengelolaan hasil tangkapan, penyediaan sarana produksi, serta pengembangan usaha bersama. Anggotanya terdiri dari berbagai lapisan nelayan, mulai dari pemilik kapal hingga buruh nelayan. Kehadiran KPL Mina Sumitra memiliki arti penting karena mampu menghimpun kekuatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjadi wadah perjuangan kolektif dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi nelayan.

Tabel 1.4
Indikator Dukungan Organisasi KPL Mina Sumitra

No.	Tahun	Bentuk Dukungan Organisasi	Indikator Dukungan Organisasi	Kesimpulan
1.	2021	Bantuan solar terbatas, es balok	Rendah	Keterbatasan dukungan membuat anggota sulit meningkatkan pendapatan meskipun kebutuhan operasional tinggi
2.	2022	Penambahan modal kecil, Renovasi fasilitas pendingin	Rendah	Dukungan meningkat tetapi tidak berdampak pada kesejahteraan anggota
3.	2023	Penambahan BBM bersubsidi, pelatihan manajemen hasil tangkap	Sedang	Dukungan organisasi membaik, namun biaya melaut tetap tinggi sehingga dampaknya masih terbatas
4.	2024	Bantuan alat tangkap ringan, penyediaan es dan BBM	Rendah	Penurunan pendapatan koperasi membuat dukungan melemah dan tidak meningkatkan kesejahteraan anggota
5.	2025	BBM, es, dan bantuan modal kecil	Rendah	Dukungan organisasi menurun akibat Raman turun drastis, anggota tetap berada pada

				ketidakstabilan pendapatan
--	--	--	--	-------------------------------

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 1.4 Dukungan Organisasi tahun 2021-2025, dapat terlihat bahwa tingkat dukungan organisasi di Koperasi perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra masih berubah-ubah dan cenderung rendah, sehingga belum mampu memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya. Pada tahun-tahun awal, bantuan berupa fasilitas, pembinaan, maupun dukungan operasional masih sangat minim, membuat anggota kesulitan meningkatkan produktivitas maupun menekan biaya saat melaut. Walaupun pada 2023 terdapat sedikit peningkatan dukungan, kondisi tersebut tidak bertahan karena keuangan koperasi kembali menurun pada 2024-2025, sehingga bantuan dan fasilitas yang sebelumnya membaik kembali mengalami pengurangan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kurangnya dukungan organisasi menjadi salah satu penyebab penting mengapa strategi kompensasi belum berjalan secara optimal dan tingkat kesejahteraan anggota masih tetap rendah.

Kondisi ini memperlihatkan adanya pelemahan peran organisasi dalam memberikan dukungan bagi anggotanya, baik dalam bentuk sarana produksi, akses pembiayaan, maupun kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Data tersebut menunjukkan bahwa berkurangnya dukungan organisasi dapat berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan anggota. Dukungan organisasi yang memadai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas serta pendapatan nelayan mitra, sehingga penurunan program dukungan berpotensi memengaruhi motivasi kerja dan loyalitas anggota.

Manajemen kompensasi adalah aspek kritis dari manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada desain, implementasi, dan pemeliharaan paket kompensasi yang efektif. Kompensasi tidak hanya mencakup gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawan, tetapi juga meliputi berbagai bentuk tunjangan, bonus, dan insentif. Menurut Thomas H. Stone dalam Rohim & Haryanto (2023: 83) “*Compensation is any form of payment to employee for work they provide their employer*”, atau dapat diartikan bahwa kompensasi adalah bentuk imbalan yang diberikan terhadap karyawan sebagai imbal jasa terhadap pekerjaan yang mereka lakukan sebagai karyawan. Sedangkan menurut Erma dalam Sri Retnoningsih *et al* (2024: 1369) kompensasi yaitu suatu imbalan atas kinerja pegawai yang berpartisipasi terhadap perusahaan dalam bentuk gaji, insentif, atau tunjangan, dengan adanya kompensasi yang diberikan bisa memajukan kinerja perusahaan yang lebih baik. Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah semua pendapatan dalam bentuk barang langsung atau tidak langsung yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Kompensasi tidak hanya mencakup gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawan, tetapi juga meliputi berbagai bentuk tunjangan, bonus, dan insentif. Dalam konteks bisnis yang semakin kompetitif, manajemen kompensasi bertindak sebagai alat strategis untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan talenta. Oleh karena itu, memahami cara kerja dan prinsip dasar di balik manajemen kompensasi menjadi penting bagi setiap professional HR.

Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Kabupaten Indramayu, pemberian kompensasi kepada anggota memiliki makna yang lebih komprehensif. Kompensasi tidak hanya sekadar balas jasa atas kontribusi kerja, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para nelayan. Sebagian besar anggota koperasi bergantung pada hasil tangkapan laut yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, musim, dan dinamika pasar. Situasi tersebut menempatkan koperasi pada posisi yang penting untuk menghadirkan skema kompensasi yang mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan keberlanjutan ekonomi bagi anggotanya. Nurhayati *et al* (2021).

Dengan perancangan kompensasi yang sistematis dan berorientasi pada kepentingan anggota, koperasi dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Skema kompensasi yang terencana tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi keluarga nelayan, tetapi juga memperkuat posisi koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, strategi kompensasi yang tepat dan berkeadilan akan berkontribusi signifikan dalam memperkuat keberlanjutan koperasi sekaligus meningkatkan taraf hidup anggotanya secara berkelanjutan. Irham Kamil & Sukmahadi (2024).

Tabel 1.5
Kompensasi KPL Mina Sumitra

NO	Tahun	Total Raman (Pendapatan Koperasi)	Rata-rata Kompensasi / Bulan & Jumlah penerima	Standar UMK Indramayu	Selisih & Indikator Kesejahteraan	Kesimpulan
1.	2021	Rp.361.696.523 .000	Rp.1.650.000 24 anggota	Rp.2.373.073	-Rp.723.073 (sangat rendah, dibawah 70% UMK)	Kompensasi masih jauh dari UMK dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar anggota
2.	2022	Rp.448.083.832 .000	Rp.1.750.000 27 anggota	Rp.2.403.708	-Rp.653.708 (rendah, sekitar 72% UMK)	Raman naik sehingga jumlah penerima bertambah, tetapi kompensasi masih tertinggal dari UMK
3.	2023	Rp.456.428.305 .000	Rp.1.850.000 29 anggota	Rp.2.541.996	-Rp.691.996 (rendah, sekitar 72% UMK)	Jumlah penerima meningkat, namun kompensasi tetap belum mampu mendekati biaya hidup
4.	2024	Rp.411.290.620 .000	Rp.1.950.000 26 anggota	Rp.2.665.000	-Rp.715.000 (sangat rendah, sekitar 73% UMK)	Raman menurun, tetapi kompensasi belum mencapai standar kesejahteraan minimum
5.	2025	Rp.261.743.433 .000	Rp.2.050.000 21 anggota	Rp.2.785.000	-Rp.735.000 (sangat rendah, sekitar 73% UMK)	Penurunan Raman menyebabkan efisiensi penerima, namun kompensasi tetap tidak mencukupi standar kesejahteraan

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan data kompensasi KPL Mina Sumitra pada Tabel 1.5, terlihat bahwa kompensasi yang diterima anggota secara konsisten berada jauh di bawah standar UMK Indramayu, dengan selisih yang termasuk kategori sangat rendah setiap tahunnya. Meskipun total raman koperasi mengalami peningkatan pada beberapa tahun, hal tersebut belum mampu meningkatkan jumlah kompensasi

secara signifikan sehingga kesejahteraan anggota masih belum tercapai. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa strategi kompensasi koperasi belum optimal dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak anggota, sehingga diperlukan perbaikan sistem kompensasi serta dukungan organisasi yang lebih kuat agar kesejahteraan anggota dapat meningkat.

Kesejahteraan anggota merupakan sasaran utama yang hendak dicapai setiap koperasi, termasuk koperasi perikanan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup para nelayan. Nelayan seringkali berada pada kondisi sosial-ekonomi yang rentan akibat ketergantungan terhadap faktor alam, fluktuasi harga pasar, dan keterbatasan akses permodalan. Oleh karena itu, keberadaan koperasi dipandang strategis sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar nelayan, menyediakan akses terhadap sumber daya, serta mendorong peningkatan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, terdapat dua faktor penting yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan anggota koperasi, yaitu penerapan strategi kompensasi yang tepat serta dukungan organisasi yang memadai. Chikmawati & Anisariza (2021).

Sistem kompensasi yang adil memastikan bahwa setiap karyawan diberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi, tanggung jawab, dan kinerja mereka. Ini mencakup pembayaran yang setara untuk pekerjaan yang setara, kesempatan yang sama untuk mendapatkan insentif dan penghargaan berdasarkan pencapaian dan prestasi kerja, Yuliana dalam Maysila Rachmawati (2024: 73)

Dukungan organisasi atau *Perceived Organizational Support* (POS) diartikan sebagai persepsi anggota mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi mereka serta memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan personal. Konsep ini menekankan bahwa organisasi tidak hanya memberikan imbalan finansial, melainkan juga mencakup perhatian emosional, perlakuan yang adil, kesempatan pengembangan diri, serta terciptanya iklim organisasi yang kondusif. Menurut Luthans dalam Agung & Vera (2022: 199) komitmen organisasional merupakan loyalitas yang ditunjukkan oleh karyawan melalui beberapa proses berkelanjutan, bagaimana seseorang karyawan merasa peduli terhadap kesuksesan dan keberhasilan yang sudah dilakukan oleh organisasi mereka bekerja. Oleh sebab itu, dukungan organisasi dapat dipandang sebagai elemen penting yang berfungsi sebagai “perekat sosial” dalam menjaga hubungan jangka panjang antara anggota dan pengurus koperasi.

Berbagai penelitian mutakhir menegaskan pentingnya dukungan organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Studi pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Perak menunjukkan bahwa supervisor support merupakan faktor dominan dalam membentuk persepsi dukungan organisasi, diikuti dengan aspek keadilan prosedural dan kondisi kerja. Rahmawati & Prasetyo (2020: 45-46). Selanjutnya, penelitian di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi menemukan bahwa POS memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterikatan kerja, yang pada gilirannya berimplikasi pada peningkatan kinerja pegawai. Junaidi (2023: 115-126). Temuan ini menegaskan bahwa

dukungan organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan serta kesejahteraan anggota.

Penelitian lain pada sektor industri menunjukkan hasil yang konsisten. (Prabowo dan Sari 2021). membuktikan bahwa POS berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja.

Dukungan organisasi dalam koperasi perikanan terwujud melalui partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan, kemudahan akses terhadap layanan koperasi, keterbukaan komunikasi, serta transparansi dalam pengelolaan usaha. Kirana *et al* (2025: 55-68) menegaskan bahwa dukungan organisasi yang kuat mampu menciptakan rasa memiliki, meningkatkan kebanggaan, serta memperkuat solidaritas antaranggota. Sebaliknya, lemahnya dukungan organisasi berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan, mengurangi partisipasi, bahkan mengancam keberlangsungan koperasi.

Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra di Kabupaten Indramayu dapat dijadikan contoh konkret mengenai pentingnya kompensasi dan dukungan organisasi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Koperasi yang berdiri sejak tahun 1984 ini berlokasi di Desa Karangsong, dan saat ini memiliki lebih dari 69 anggota aktif. Sebagai salah satu koperasi perikanan terbesar di Jawa Barat, KPL Mina Sumitra mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, memberikan layanan perkreditan, penyediaan sarana produksi, serta program pemberdayaan nelayan. Penelitian menunjukkan bahwa layanan perkreditan yang disediakan koperasi tersebut berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota

nelayan. Kondisi ini membuktikan bahwa dukungan organisasi dalam bentuk penyediaan layanan keuangan maupun fasilitas usaha memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan anggota.

Koperasi ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidakstabilan harga ikan, perubahan iklim yang berdampak pada hasil tangkapan, keterbatasan modal, serta persaingan pasar. Situasi tersebut semakin menegaskan pentingnya dukungan organisasi agar anggota memiliki rasa aman, keyakinan, serta motivasi untuk tetap aktif dalam kegiatan koperasi. Penguatan strategi kompensasi yang dipadukan dengan dukungan non-finansial, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan jaminan sosial, maupun akses fasilitas produksi, menjadi langkah yang relevan untuk menjaga keberlangsungan koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fenomena yang terjadi di lapangan, serta teori dan hasil penelitian sebelumnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“STRATEGI KOMPENSASI DAN DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA KOPERASI PERIKANAN LAUT MINA SUMITRA KABUPATEN INDRAMAYU”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan serta menjelaskan inti persoalan yang menjadi fokus kajian, sehingga dapat mempermudah proses penelitian sekaligus analisis hasil. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota koperasi,

khususnya di Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah-masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan proses pengkajian dari permasalahan – permasalahan yang akan diteliti. Peneliti meneliti fenomena tersebut dan membuat identifikasi permasalahan yang ada di latar belakang penelitian yang telah di paparkan, maka peneliti merumuskan ke dalam bentuk pernyataan – pernyataan sebagai berikut:

1. Strategi Kompensasi yang diterapkan koperasi belum mampu memenuhi standar kebutuhan minimum.
 - a. Nilai kompensasi setiap tahun selalu berada di bawah UMK Indramayu.
 - b. Kenaikan kompensasi tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup dan tidak mengikuti perubahan total Raman koperasi.
 - c. Ketidakmampuan kompensasi menutup kebutuhan dasar anggota berdampak pada rendahnya kesejahteraan nelayan.
2. Dukungan organisasi KPL Mina Sumitra masih belum stabil dan cenderung menurun.
 - a. Bantuan operasional seperti BBM, Es, dan sarana produksi tidak stabil dari tahun ke tahun.
 - b. Penurunan Raman pada tahun 2024-2025 menyebabkan dukungan semakin terbatas.

- c. Minimnya dukungan berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya biaya melaut anggota.
3. Kesejahteraan anggota tetap rendah meskipun terjadi peningkatan Raman pada beberapa tahun.
 - a. Selama tahun 2021-2025 Indikator kesejahteraan sebagian besar berada pada kategori “rendah”
 - b. Pendapatan nelayan tidak stabil akibat biaya melaut, ketergantungan musim, dan harga ikan yang tidak menentu.
 - c. Kesejahteraan tidak meningkat karena strategi kompensasi dan dukungan organisasi belum mampu menjawab tantangan tersebut.
4. Belum terpenuhinya keterkaitan antara strategi kompensasi, dukungan organisasi, dan kesejahteraan anggota.
 - a. Kebijakan kompensasi tidak didukung oleh program organisasi yang memadai.
 - b. Pengurus dan anggota belum memiliki pemahaman yang sama terkait strategi yang diterapkan.
 - c. Tidak adanya integrasi yang kuat antara kebijakan finansial dan kebijakan pemberdayaan anggota.
5. Tantangan keberlanjutan koperasi akibat penurunan kinerja operasional
 - a. Penurunan Raman dan rendahnya dukungan organisasi berpotensi menurunkan loyalitas anggota.
 - b. Jika tidak ditangani, dapat mengancam keberlangsungan fungsi koperasi sebagai penyedia layanan ekonomi bagi nelayan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi kompensasi yang di terapkan oleh Koperasi Perikanan (KPL) Mina Sumitra Indramayu?
2. Bagaimana bentuk dukungan organisasi yang diberikan oleh Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu terhadap anggotanya?
3. Bagaimana tingkat kesejahteraan anggota berdasarkan strategi kompensasi dan dukungan organisasi yang diterapkan?
4. Bagaimana keterkaitan antara strategi kompensasi dan dukungan organisasi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mendeskripsikan strategi kompensasi yang dijalankan oleh Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Menggambarkan bentuk dukungan organisasi yang diberikan oleh Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu terhadap anggotanya.

3. Menganalisis tingkat kesejahteraan anggota berdasarkan kondisi kompensasi dan dukungan organisasi.
4. Menganalisis keterkaitan antara strategi kompensasi dan dukungan organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Sumber Daya Manusia, penulis juga berharap dengan melakukan penelitian ini akan memperoleh hasil yang dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan juga pihak – pihak lain.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak diantaranya:

1. Menambah wawasan dan literatur, dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), khususnya terkait kompensasi, dukungan organisasi, dan kesejahteraan anggota pada pembahasan koperasi.
2. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian mengenai penerapan strategi kompensasi dan dukungan organisasi pada organisasi berbasis komunitas seperti koperasi perikanan.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan kebijakan organisasi terhadap kesejahteraan anggota dalam sektor koperasi maupun sektor perikanan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun pihak yang dapat merasakan kegunaan dari peneliti ini antara lain, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat yang sangat penting, terutama dalam memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai strategi kompensasi, dukungan organisasi, serta kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi.

2. Bagi Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu

Memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengurus koperasi dalam merumuskan strategi kompensasi yang lebih efektif, adil dan transparan serta memperkuat bentuk dukungan organisasi terhadap anggotanya.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat memberikan referensi atau bahan informasi lain kepada para pembaca mengenai Strategi Kompensasi dan Dukungan Organisasi.